



ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH EMPING MELINJO OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR DI KABUPATEN PANDEGLANG

Ita Rosita Wahyiah¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: itaku87@gmail.com

Abstrak

Analisis pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Pandeglang. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya pemberdayaan UKM emping melinjo oleh dinas perindustrian perdagangan dan pasar kabupaten pandeglang. Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan UKM emping melinjo yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang; Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan UKM emping melinjo oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang; Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan UKM emping melinjo oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu cara dalam mengungkapkan permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang dan para pengrajin emping melinjo di Kabupaten Pandeglang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pemberdayaan UKM emping melinjo oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan belum optimal karena para pengrajin emping melinjo di Kabupaten Pandeglang masih memiliki ketidak berdayaan, yang dilihat dari aspek kewirausahaan, kemitraan dan pengembangan teknologi; Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan UKM emping melinjo diantaranya: rendahnya semangat kewirausahaan, kurangnya tenaga teknis, Keterbatasan dana, Alat produksi, bahan baku, dan kurangnya minat konsumen; Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang diantaranya: pelatihan, mempersiapkan tenaga teknis, bantuan permodalan, bantuan alat semi modern, menyusun dan melaksanakan program khusus pemberdayaan UKM emping melinjo, diadakan pameran produk dan studi banding.

Kata kunci: *Pemberdayaan, UKM Emping Melinjo*

Abstract

Empowerment analysis UKM emping melinjo by Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang. Focuses on the minimum "Empowerment UKM emping melinjo by Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang. The research questions are as follows: How the empowerment of UKM emping melinjo has been done by Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang; What are the ance factors faced in empowerment UKM emping melinjo by Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang; How are the efforts done to overcome resistances in enableness of UKM emping melinjo by Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang.

This research applies qualitative approach by using and descriptive method. descriptive research method is a way to unfold problems by depicting and explaining phenomena happened in the society based on the fact. The interview session held by officer of Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang, the owner and the workers of central UKM emping melinjo in Kabupaten Pandeglang.

The results of this research are as follows: The empowerment of UKM emping melinjo by Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang hasn't optimum yet since the workers and UKM emping melinjo are still having burdens. It can be seen from enterprenership, partnership and technology; There are many burdens in empowerment UKM emping melinjo, such asa: lack of enterprenership spirit of the workers; lack of technical worker/field instructor; limitation of fund, lack of production tools, raw material; The effort have been done by Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang to overcome this problem are training, technical workers preparation, fund assistance, semi-modern tools assistance; implementation of special empowerment program of UKM emping meiljo, and product exhibition.

Keywords: Empowerment, UKM Emping Melinjo

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam menghadapi era globalisasi yang dicirikan dengan ketatnya persaingan antar Negara, menuntut semua Negara mampu bersaing termasuk Indonesia. Untuk memenuhi perkembangan zaman, pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang. Salah satunya adalah perekonomian rakyat. Berbagai upaya dan strategi pengembangan ekonomi telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Khususnya melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di daerah kabupaten atau kota, dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan implementasi dari asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) bahwa: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan dan mengatur urusan-urusan pemerintahan didaerah dan segala kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan dan kewajiban dari pemerintah daerah.

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Menurut salam (2008:4) bahwa "kegiatan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang mendasar sehingga masih sangat

sulit untuk berkembang”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang profil UKM (dalam Salam, 2008: 4) diketahui bahwa “permasalahan yang sering dihadapi oleh UKM antara lain adalah manajemen usaha yang masih bersifat tradisional, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang masih terbatas, dan terbatasnya akses pembiayaan usaha”.

Berdasarkan pada Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada maka pemerintah Daerah kabupaten Pandeglang memiliki kewenangan dalam menjalankan segala urusan yang menjadi urusan pemerintahan daerah, salah satunya bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti adanya program pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan untuk usaha kecil menengah (UKM).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menetapkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindag) sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengatur bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah. Maka berdasarkan tugas dan fungsinya Disperindag melakukan berbagai pemberdayaan UKM, khususnya pada pemberdayaan pelaku UKM pangan salah satunya pemberdayaan UKM emping melinjo. Pemerintah menyadari bahwa UKM pangan memiliki kontribusi besar untuk kemajuan perekonomian daerah. Untuk itu pemerintah daerah kabupaten Pandeglang melakukan berbagai upaya memberdayakan UKM, terutama sentra UKM emping melinjo dan para pengrajin emping melinjo guna meningkatkan produksinya, juga diharapkan melalui pemberdayaan yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan yang mendasar.

Seorang ahli ilmu ekonomi, mengemukakan bahwa pemberdayaan UKM menurut Prawirokusumo (2001: 91) bahwa pemberdayaan diartikan “sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk (a) penumbuhan iklim usaha yang kondusif (b) pembinaan dan pengembangan yang didalamnya berupa bimbingan dan bantuan perkuatan”.

Dalam menciptakan pemberdayaan dan penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya koperasi dan UKM tanpa adanya iklim usaha yang kondusif, UKM dan koperasi dengan keterbatasannya tidak akan mampu bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Dalam hal ini menurut Prawirokusumo (2001:12) bahwa salah satu langkah untuk memberdayakan UKM dapat menggunakan beberapa program yang bias ditempuh antara lain:

1. Pengembangan kewirausahaan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan daya saing, koperasi dan UKM harus mampu berpacu tidak lagi hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki tetapi juga menggunakan SDM yang lebih bermutu dan berwawasan Iptek.

2. Program kemitraan

Program kemitraan ini dimaksudkan adalah kerjasama usaha antara koperasi dan UKM dengan usaha besar yang disertai unsur pembinaan oleh UB kepada mitra binaannya dengan mengikuti prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

3. Pengembangan teknologi

Dengan pengembangan desa cerdas teknologi akan memberikan arti bahwa usaha yang dilakukan sendiri-sendiri kini dilakukan secara bersama-sama. Keberhasilan yang tadinya bersifat local disebarluaskan hingga ketingkat nasional. Kegiatan yang tadinya terbatas pada kelompok-kelompok kecil tertentu diusahakan hingga mencakup kelompok masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat pedesaan, anggota dan pengelola koperasi dan UKM diharapkan dapat lebih mampu memanfaatkan dan menguasai teknologi.

Pemberdayaan tersebut merupakan upaya untuk memberikan kemampuan, berdaya atau memiliki kekuatan sehingga akan menghasilkan kemandirian. Suharto (2005:59-60) menyimpulkan bahwa:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social; yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti bahwa kondisi UKM emping melinjo dikabupaten pandeglang masih sangat lemah, meski saat ini emping melinjo sudah lebih diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku usaha besar lainnya namun melihat kondisi sarana dan prasarana masih sangat kurang, selain itu lemahnya pengetahuan para

pengrajin, lemahnya manajemen, kurangnya mengetahui media digital atau teknologi modern dalam memasarkan produk dan kemasan produk, kurangnya semangat kewirausahaan, rendahnya kualitas produk, persediaan bahan baku yang kurang dan menurunnya omset atau pendapatan dari setiap sentra UKM emping melinjo. Selain itu kondisi kehidupan sehari-hari pengrajin ada yang masih sangat memprihatinkan. Kebersihan lingkungan yang tidak terawat dapat mempengaruhi kebersihan produk, keadaan ekonomi para pengrajin yang serba ketidakcukupan, karena para pengrajin hanya mengandalkan dari penghasilan penjualan dan buruh emping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan melihat kondisi seperti ini program pemberdayaan UKM emping melinjo masih belum optimal dan terlihat tidak merata. Peneliti menduga adanya unsur perhatian lebih kepada usaha menengah dibandingkan dengan perhatian kepada usaha kecil yang seharusnya lebih diperhatikan. Selain itu adanya ketidakmerataan dalam pelaksanaan program pengembangan berupa pemberian alat, modal dan pelatihan untuk pengrajin emping melinjo.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti, melihat kondisi pengrajin dan keadaan sentra emping melinjo di kabupaten pandeglang masih terlihat belum optimalnya pemberdayaan UKM emping melinjo, bahkan program khusus untuk emping melinjo masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Mengingat bahwa tahun-tahun lalu emping melinjo belum menjadi prioritas utama. Padahal emping melinjo merupakan makanan khas yang perlu diprioritaskan dan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah.

Maka secara spesifik peneliti disini akan mengkaji tentang pemberdayaan UKM emping melinjo yang dilakukan oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang. Disperindagpas kabupaten pandeglang mengeluarkan berbagai strategi untuk pemberdayaan UKM emping melinjo, adapun program yang dikeluarkan oleh Disperindagpas kab. Pandeglang yaitu: Administrasi kegiatan berupa personil yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan; pengadaan bahan-bahan dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi kegiatan; koordinasi dan konsultasi ke departemen perindustrian dan lembaga terkait, selain itu adanya program pendidikan dan pelatihan teknis berupa pemberian pelatihan dan bimbingan teknis dalam penerapan *GMP (Good manufacturing practices)* bagi para pengrajin UKM emping melinjo, pelatihan manajemen sederhana, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengemasan produk, pemasaran produk, dan program bantuan usaha ekonomi produktif berupa bantuan mesin peralatan semi modern.

Pelaksanaan program pemberdayaan atau pengembangan tersebut sangat dibutuhkan dalam kemajuan UKM emping melinjo, namun pada kenyataannya program tersebut belum

sepenuhnya dilaksanakan, bahkan program tersebut hanya berupa program kerja tertulis yang tanpa terasa realisasinya, karena peneliti melihat para pengrajin masih banyak yang belum memahami dan menggunakan manajemen sederhana seperti pembukuan, pengrajin juga masih banyak yang menggunakan kemasan produk sederhana tanpa sablon merk atau nama perusahaan dagangnya, dan pemberian bantuan alat semi moder yang belum merata.

Berdasarkan hal tersebut diduga yang menjadi permasalahannya adalah:

- Kurangnya peran pemerintah dalam hal ini Disperindagpas dalam menjalankan pembinaan dan pengembangan bagi UKM pangan di Kabupaten Pandeglang, khususnya untuk UKM emping melinjo, terlihat tidak mencapai tujuan dan tidak merata.
- Pembinaan dan pengembangan UKM emping melinjo kurang adanya perhatian khusus dan tidak di prioritaskan oleh pemerintah. Terlihat adanya sentra emping melinjo yang gulung tikar dan kualitas produk yang di hasilkan kurang mampu bersaing dipasaran.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan lingkungan dalam mendukung program program pembinaan dan pengembangan UKM emping melinjo di kabupaten pandeglang.
- Kurangnya dukungandana atau anggaran
- Kurangnya bahan baku dan keterbatasan mesin peralatan produksi dan sarana prasarana yang menunjang dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan UKM emping melinjo, terlihat para pengrajin masih menggunakan alat tradisional.
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengrajin baik dalam manajemen maupun teknik produksi yang minim atau tingkat pendidikan para pengrajin yang menjadi peserta kegiatan pelatihan rata-rata relatif masih rendah, sehingga proses penyerapan atau transformasi ilmu dan pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan belum dapat terserap sepenuhnya.
- Kurangnya motivasi para pengrajin dan semangat kewirausahaan dalam berkreasi untuk keberhasilan pengembangan usahanya.
- Belum seimbangannya antara pembinaan dan pengembangan UKM yang dilakukan, dengan jumlah UKM emping melinjo di kabupaten pandeglang sehingga menimbulkan pemberdayaan yang tidak merata.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemberdayaan UKM emping melinjo yang dilakukan oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang. Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Dinas Perindustrian perdagangan Dan Pasar Di Kabupaten Pandeglang-Banten**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya peran pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan bagi UKM Emping Melinjo di Kabupaten Pandeglang.
2. Adanya keterbatasan dana, bahan baku, keterbatasan mesin peralatan produksi dan sarana prasarana yang menunjang dalam meningkatkan pengembangan UKM emping melinjo di Kabupaten Pandeglang.
3. Minimnya pengetahuan para pengrajin dalam manajemen pemasaran, pengelolaan dan rendahnya semangat kewirausahaan para pengrajin dalam berkreasi untuk keberhasilan pengembangan usahanya.

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan UKM Emping melinjo yang dilakukan oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sudah sejauh mana pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan UKM Emping melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk kepentingan peneliti sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kajian ilmu pemerintahan mengenai salah satu fungsi pemerintahan yaitu pemberdayaan.
- b. Untuk kepentingan akademis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu pemerintahan dan ilmu sosial pada umumnya.

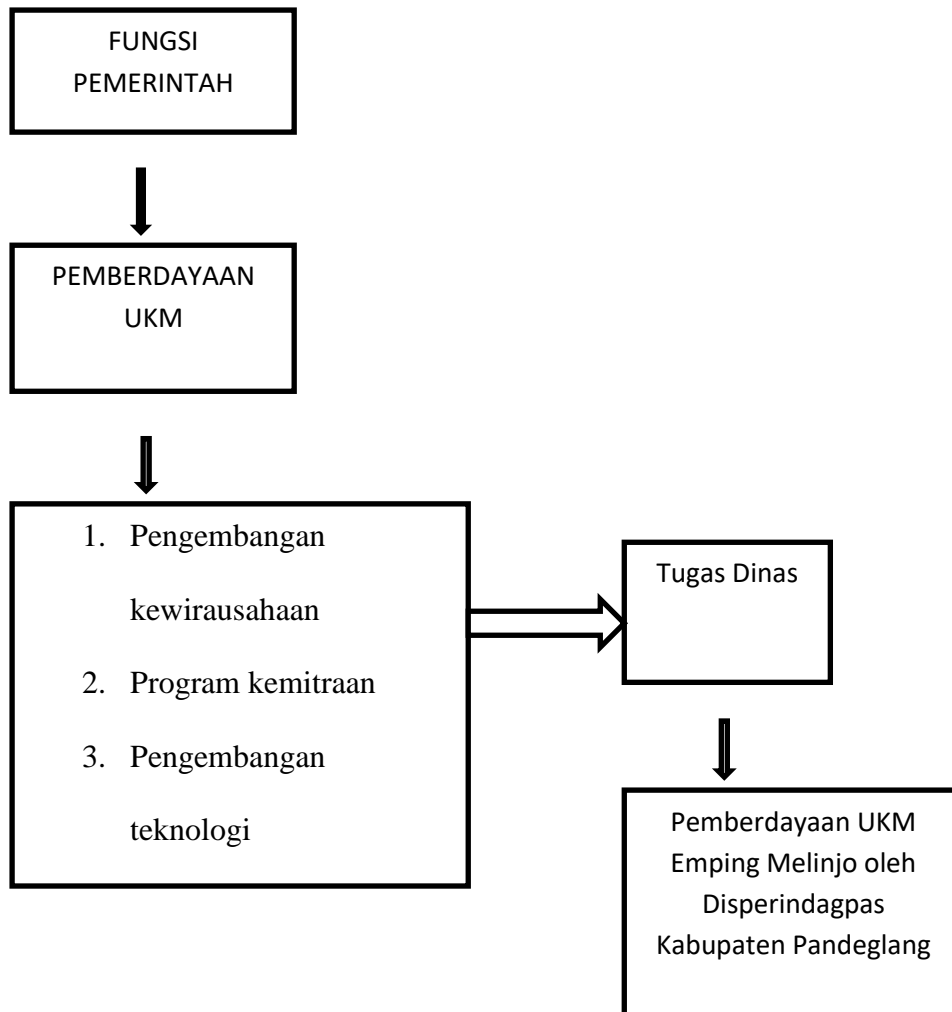
2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi Disperindagpas Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pemberdayaan UKM khususnya Emping Melinjo.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian, maka peneliti disini menyusun kerangka pemikiran dalam gambar berikut ini:



Sumber: Hasil olahan peneliti yang dikutip dari sumber Prawirokusumo (2001:12)

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu cara dalam mengungkapkan permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari perilaku, keadaan dan kondisi orang-orang yang diamati, gambar atau foto catatan hasil wawancara dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dapat diamati. Pendapat ini diambil dari Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2008: 5).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan menggunakan metode alamiah.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisannya terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN isi dari bab ini meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA isi dari bab ini meliputi: pengertian pemerintah, pengertian pemerintah daerah, pengertian pemberdayaan, pengertian UKM, tujuan pemberdayaan UKM, bentuk dan jenis-jenis UKM, pengertian sentra, pengertian pengrajin.

BAB III HASIL PENELITIAN isi dari bab ini meliputi: kondisi umum kabupaten pandeglang, kondisi geografis, geologi, topografi dan iklim, demografi, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, profil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang, Dasar hukum pembentukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang.

BAB IV PEMBAHASAN isi dari bab ini meliputi: pembahasan hasil wawancara dan penelitian; Bagaimana pemberdayaan UKM Emping melinjo yang dilakukan oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang, Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan UKM Emping Melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang

BAB V PENUTUP isi dari bab ini meliputi: kesimpulan dan saran.

A. Pengertian Pemerintah

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam hal ini Ndraha (dalam Napitupulu, 2007: 7) menyatakan bahwa istilah “perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. dengan

demikian pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Humes dan Martin (dalam Kaho, 2001: 27) menerapkan arti pemerintah daerah sebagai berikut: “local government as an infra squveregin geographic subdivision at the local level”. (pemerintah daerah adalah bagian dari politik dari suatu negara dimana konstitusi hukum telah dibuat dan disepakati untuk mengendalikan urusan di daerah).

C. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat maupun lingkungan akademis. Istilah pemberdayaan dalam bahasa indonesia merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “empowerment” dapat di artikan sebagai pemberkuasaan dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan power kepada masyarakat yang lemah.

Menurut Ndraha (2003:75-76) ada pemberdayaan dalam arti empowering yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik dan ada pemberdayaan dalam arti enabling, yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Menurut wasisitiono (1998:46) pemberdayaan dapat dibedakan menjadi empat macam dilihat dari sasaran dan ruang lingkupnya, yaitu sebagai berikut: “pemberdayaan pada individu anggota organisasi atau anggota masyarakat, pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat, pemberdayaan pada organisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat secara keseluruhan”.

Sedangkan pemberdayaan UKM itu sendiri menurut ahli, dalam hal ini menurut Prawirokusumo (2001:12) bahwa salah satu langkah untuk memberdayakan UKM dapat menggunakan beberapa program yang bias ditempuh antara lain:

1. Pengembangan kewirausahaan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan daya saing, koperasi dan UKM harus mampu berpacu tidka lagi hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki tetapi juga menggunakan SDM yang lebih bermutu dan berwawasan Iptek.

2. Program kemitraan

Program kemitraan ini dimaksudkan adalah kerjasama usaha antara koperasi dan UKM dengan usaha besar yang disertai unsur pembinaan oleh UB kepada mitra binaannya

dengan mengikuti prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

3. Pengembangan teknologi

Dengan pengembangan desa cerdas teknologi akan memberikan arti bahwa usaha yang dilakukan sendiri-sendiri kini dilakukan secara bersama-sama. Keberhasilan yang tadinya bersifat local disebarluaskan hingga ketingkat nasional. Kegiatan yang tadinya terbatas pada kelompok-kelompok kecil tertentu diusahakan hingga mencakup kelompok masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat pedesaan, anggota dan pengelola koperasi dan UKM diharapkan dapat lebih mampu memanfaatkan dan menguasai teknologi.

D. Pengertian UKM

Pengertian tentang UKM tidak selalu sama, dan sangat bervariasi, disuatu negara berlainan dengan negara lainnya. Pengertian UKM dapat dilihat dari segi kriteria jumlah pekerja dengan segi pendapatan dan modal yang dimilikinya. UKM menurut partomo dan soejodono (2004: 13) memiliki dua aspek yaitu:

Aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan atau kelompok perusahaan. Contohnya di indonesia: biro statistik pusat mempunyai kriteria usaha kecil jika karyawan 5-19 orang jika kurang dari 5 orang digolongkan usaha rumah tangga, dan usaha menengah terdiri dari 20-99 karyawan.

Menurut BPS (dalam irawan, 2007: 8-9) bahwa UKM merupakan entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian: usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari satu sampai dengan 4 tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari 5 sampai 19 orang, usaha menengah terdiri dari 20 sampai 99 orang, dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih.

E. Tujuan Pemberdayaan UKM

Dalam undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah, dalam pasal 1 ayat (8) bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Tujuan pemberdayaan menurut Prawirokusumo (2001:17) mengandung maksud yaitu: menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil, yang akan memberikan peluang hidup berkembang bagi UKM. Pemberdayaan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan

kemanfaatan jangka panjang bagi kepentingan ekonomi secara keseluruhan dan masyarakat.

Maksudnya:

- Pemberdayaan diberikan untuk menjamin semua pelaku berada pada kondisi sehat yaitu persaingan yang bersifat antar pelaku ekonomidalam hal-hal memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam membeli, menghasilkan dan menjual barang-barang dan jasa.
- Pemberdayaan UKM perlu diberikan terutama bagi kepentingan UK agar terhindar dari perlakuan persaingan yang mematikan atau tingkah laku bisnis yang dapat menghalangi UK memasuki suatu industri.

F. Bentuk Dan Jenis-Jenis UKM

Berbagai usaha kecil menengah yang terdapat di indonesia dapat digolongkan menurut bentuk-bentuk dan jenisnya. Secara umum usaha kecil dapat dikeolmokaan kedalam 3 tiga golongan khusus yaitu menurut Subanar (2001:3-4)

a. Industri kecil

Misalnya: industri kerajinan rakyat, konveksi dan berbagai industri pangan lainnya

b. Perusahaan berskala besar

Misalnya: penyalur, toko kerajinan, koperasi, wasareba, restoran, toko bunga, jasa profesi dan lainnya.

c. Sektor informal

Misalnya: agen barang bekas, dan kios kaki lima.

Jenis usaha kecil juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis produk, jenis usaha yang dikenal menurut Adi (2007: 15) meliputi:

1. Usaha perdagangan

Keagenan: agen koran, sepatu, pakaian, dan lainnya; pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, makanan dan lainnya.

2. Usaha pertanian

Meliputi perkebunan, peternakan, perikanan

3. Usaha industri

Meliputi makanan dan minuman, pertambangan, pengrajin, dan konveksi

4. Usaha jasa

Meliputi jasa konsultasi, perbengkelan, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi dan jasa pendidikan.

G. Pengertian Sentra

Pengertian sentra yang dikutip dari (<http://smecda.com>) tentang kajian efektifitas model penumbuhan klaster bisnis UKM berbasis agribisnis bahwa sentra didefinisikan sebagai “pusat kegiatan dikawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster”. Pengertian klaster adalah pusat kegiatan UKM pada sentra yang telah berkembang, ditandai oleh munculnya pengusaha pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing UKM dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung.

H. Pengertian Pengrajin.

Menurut Riswandi (<http://www.iprcentre.org/artikel/pengrajin>), bahwa pengrajin pada dasarnya merupakan pelaku yang menuangkan ide dan gagasan sehingga dapat menghasilkan sebuah kerajinan. Pengrajin adalah subjek yang terdiri dari satu orang saja, sementara kalau subjeknya terdiri dari beberapa orang maka dinamakan pengrajin. Pengrajin menghasilkan beraneka ragam karya seperti kerajinan tangan, ukiran, anyaman, desain-desain produk dan produk produk makanan olahan yang dapat dikembangkan menjadi produk produk kerajinan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Pemberdayaan UKM emping melinjo merupakan serangkaian kegiatan yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah kabupaten pandeglang dalam hal ini Disperindagpas kepada sentra UKM emping melinjo dan para pengrajin. Adapun pelaksanaan program pemberdayaan atau pengembangan UKM emping melinjo memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengrajin (SDM), kualitas produk, tingkat pemasaran, dana, alat, dan sarana prasarana yang menunjang, sehingga sentra UKM emping melinjo mampu bersaing dipasar global maupun domestik.
- b. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan atau program pengembangan UKM emping melinjo oleh Disperindagpas Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya optimal, hal tersebut setelah diukur dengan teori pemberdayaan dapat dilihat sebagai berikut:
 1. Pengemangan kewirausahaan meliputi:
 1. Memiliki kemampuan manajemen
 2. Memiliki teknik produksi
 3. Memiliki kualitas produk yang baik

4. Memiliki kemampuan rancang produk
 5. Memberikan kemudahan dalam pengadaan permodalan
 6. Sarana prasarana produksi dan pengolahan yang modern
 7. Memiliki pengetahuan tentang pemasaran produk
 8. Tersedianya bahan baku yang mudah
 9. Memiliki bahan penolong dan kemasan
 10. Meningkatkan SDM para pengrajin
2. Program kemitraan meliputi:
1. Adanya kerjasama usaha antara koperasi dan UKM
 2. Adanya kerjasama antara koperasi, UKM dan usaha besar
 3. Adanya unsur pembinaan oleh usaha besar kepada usaha kecil, koperasi dan usaha menengah.
3. Pengembangan teknologi meliputi:
1. Tersedianya alat-alat produksi dan pengolahan yang modern
 2. memiliki kemampuan dalam menggunakan alat-alat modern
 3. tersedianya teknologi komunikasi dan transportasi.

Hasil analisis dan observasi dari beberapa point tersebut bahwa pemberdayaan UKM oleh Disperindagpas belum optimal. Para pengrajin sebagai pelaku usaha pada umumnya belum memenuhi semua aspek yang seharusnya dimiliki oleh semua pelaku usaha. Selain itu pelaksanaan program pengembangan tidak merata, seperti dalam pemberian bantuan peralatan, pelaksanaan program banyak para pengrajin yang tidak mengikuti program yang diselenggarakan.

Para pengrajin masih banyak yang tidak memiliki dan tidak memahami tentang manajemen sederhana seperti pembukuan, para pengrajin juga masih banyak yang menggunakan desain sederhana, tidak tersedianya alat modern, kurangnya pemahaman dalam menggunakan teknologi modern untuk pemasaran, komunikasi dan transportasi.

- c. Berdasarkan hasil observasi adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan UKM emping melinjo yang dilakukan Disperindagpas Kabupaten Pandeglang meliputi:
1. Rendahnya semangat kewirausahaan para pengrajin, sikap mental para pengrajin masih rendah, kurangnya pendidikan, rendahnya pengetahuan dalam pemasaran produk dan kemasan produk yang modern.
 2. Kurangnya tenaga teknis atau penyuluh lapangan dari Disperindagpas Kabupaten Pandeglang.
 3. Keterbatasan dana untuk pengembangan atau pemberdayaan

4. Keterbatasan alat-alat teknologi modern
 5. Banyak keluhan mengenai keterbatasan bahan baku, mengingat melinjo adalah buah musiman.
 6. Fasilitas/peralatan produksi yang masih kurang, sehingga dalam pemberian bantuan semi modern masih tidak merata.
 7. Kurangnya minat konsumen dan masih rendahnya permintaan pasar sehingga omset terus menurun.
- d. Untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut Disperindagpas Kabupaten Pandeglang mengeluarkan berbagai upaya meliputi:
1. Para pengrajin akan terus diberikan penyuluhan melalui pelatihan mengenai kewirausahaan.
 2. Akan terus diadakannya kerjasama dengan koperasi dalam bantuan permodalan dan pelatihan bagi para pengrajin emping melinjo.
 3. Diberikan bantuan alat alat semi modern
 4. Diberikan penyuluhan kepada pengrajin tentang penggunaan teknologi untuk mempermudah pemasaran.
 5. Diberikan penyuluhan kepada pengrajin tentang kemudahan melakukan pinjaman modal melalui koperasi atau Bank
 6. Disperindagpas Kabupaten Pandeglang untuk kedepannya memiliki program khusus untuk kemajuan UKM emping melinjo.
 7. Terus mengikuti pameran untuk memperkenalkan produk emping kedaerah luar dalam berbagai kesempatan dan kegiatan.

Dengan demikian pada tahun tahun kedepan Disperindagpas Kabupaten Pandeglang akan lebih memprioritaskan UKM emping melinjo yang menjadi komoditi unggulan daerah. Agar UKM melinjo dapat lebih maju dan berkembang. Dengan berusaha meningkatkan kemampuan para pengrajin dalam berbagai aspek dengan melaksanakan program secara optimal.

B. SARAN

1. Saran untuk Disperindagpas Kabupaten Pandeglang:
 - a. Harus lebih meningkatkan kinerjanya
 - b. Harus lebih fokus agar tidak salah sasaran dalam pemberian bantuan
 - c. Melakukan pendekatan terus menerus kepada para pengrajin yang memiliki pendidikan rendah agar transformasi ilmu pengetahuan dapat terserap dengan maksimal.

- d. Harus lebih meningkatkan kembali kinerja tenaga teknis/UPL.
2. Saran untuk pemilik sentra dan pengrajin emping melinjo:
 - a. Untuk meningkatkan produktifitas pengrajin pemilik sentra dapat meningkatkan atau menaikkan upah atau adakan pemberian bonus.
 - b. Lebih memperhatikan tempat atau lokasi penjualan, mulai dari tata letak produk, layout/desain ruangan, kebersihan, kenyamanan dan kerapihan tempat penjualan/toko atau showroom.
 - c. Meningkatkan promosi melalui memanfaatkan media teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, M Kwartono. 2007. Analisis Usaha Kecil Menengah. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Hurairah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan). Bandung: Humaniora.
- Marsuki. 2006. Pemikiran dan strategi memberdayakan sektor ekonomi UMKM di Indonesia. Jakarta: Mitra wacana media
- Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda karya
- Mukhtar. 2007. Bimbingan skripsi, tesis dan artikel ilmiah. Ciputat: gaung persada.
- Mudjiarto dan Wahid Aliaras. 2006. Membangun karakter dan kepribadian kewirausahaan. Yogyakarta: graha ilmu.
- Nasution, S. 2003. Metode penelitian naturalistik kualitatif. Bandung: tarsito
- Napitupulu, paimin. 2007. Pelayanan publik dan customer satisfaction. Bandung: PT. Alumni
- Partomo, titik sartika dan soejodono, abd rachman. 2004. Ekonomi skala kecil/ menengah dan koperasi. Bogor selatan: Ghalia indonesia
- Prawirokusumo, soeharto. 2001. Ekonomi rakyat (konsep, kebijakan dan strategi) yogyakarta: BPFE
- Priyono, onny s dan pranarka. 1996. Pemberdayaan: konsep, kebijakan dan implementasi. Jakarta: CSIS
- Roesmidi dan risyanti riza. 2006. Pemberdayaan masyarakat. Jatinangor: alqa print
- Sugiyono. 2007. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, edi. 2005. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama
- Subanar, harimurti. 2001. Manajemen usaha kecil. Yogyakarta: BPFE
- Syafiie, inu kencana. 2007. Pengantar ilmu pemerintahan. Bandung: PT. refika aditama
- Tambunan, tulus T.H. 2002. Usaha kecil menengah di indonesia beberapa isu penting. Jakarta: salemba empat
- Wasistiono, sadu 1998. Pemberdayaan aparatur daerah. Bandung: Abdi Praja.

Dokumen:

- Republik indonesia. 2006. Undang-undang dasar tahun 1945. Bandung: nuansa aulia
- Republik indonesia. 2008. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
- Republik indonesia. 2003. Peraturan Daerah kabupaten pandeglang nomor 06 tahun 2003 tentang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)

Profil kabupaten pandeglang

Profil dinas perindustrian perdagangan dan pasar kabupaten pandeglang.

Artikel:

[http://www.Iprecentre.Org/artikel/pengertian pengrajin](http://www.Iprecentre.Org/artikel/pengertian%20pengrajin)

[http://smecda.com/artikel/pengertian sentra UKM](http://smecda.com/artikel/pengertian%20sentra%20UKM)